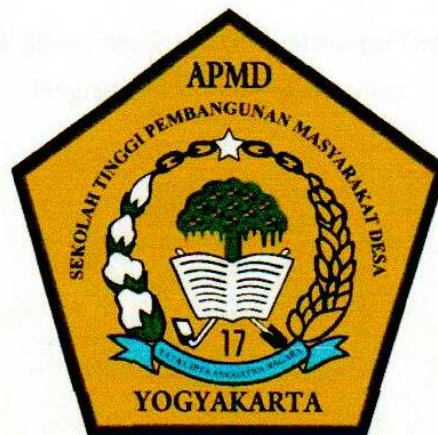


**KERJA SAMA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT  
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA**

**(Studi Di Desa Tang Badui, Kecamatan Krayan Tengah,  
Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara)**

**SKRIPSI**



**ROYEN**

**18520039**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
“APMD” YOGYAKARTA**

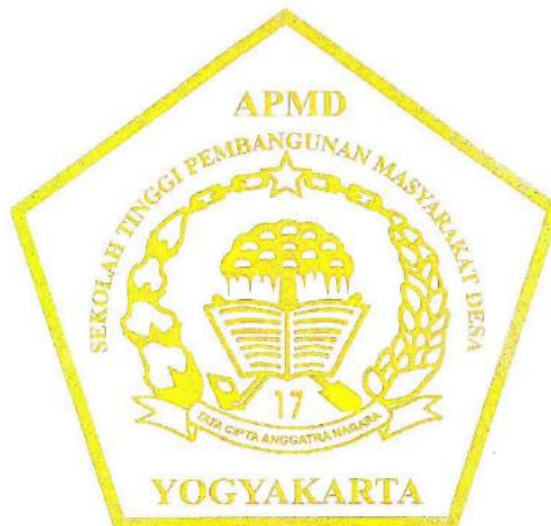
**2025**



**KERJA SAMA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT  
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA  
(Studi Di Desa Tang Badui, Kecamatan Krayan Tengah,  
Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana S-1  
Program Studi Ilmu Pemerintahan



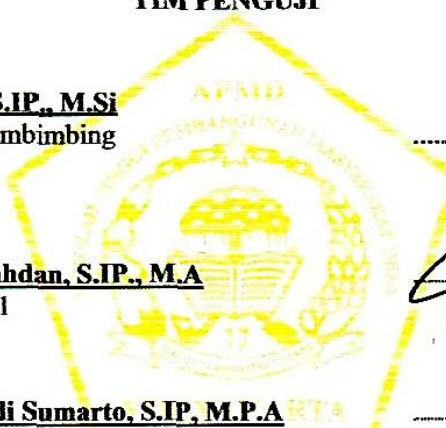


**ROYEN  
18520039**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
“APMD” YOGYAKARTA  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 13 Februari 2025  
Waktu : 10.00-11.15 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI		
Nama		Tanda Tangan
1. <u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u> Ketua Penguji/ Pembimbing		
2. <u>Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A</u> Penguji Samping 1		
3. <u>Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP., M.P.A</u> Penguji Samping 2		

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
  
Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Royen

NIM : 18520039

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan Dengan Sesungguhnya Bahwa Skripsi Yang Berjudul **“Kerja Sama Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Studi Di Desa Tang Badui, Kecamatan Krayan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara”** Adalah Betul-Betul Karya Saya Sendiri, Dan Sepanjang Pengetahuan Saya Tidak Terdapat Karya Atau Pendapat Yang Pernah Ditulis Dan Diterbitkan Oleh Yang Lain. Hal-Hal Yang Bukan Karya Saya Dalam Skripsi Ini, Telah Disebutkan Dalam Teks Dan Dicantumkan Dalam Daftar Pustaka.

Yogyakarta, 17 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



**Royen**

**18520039**

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA

### ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Royen  
NIM : 18520039  
Telpon : 0822-5625-0963  
Email : [royenherman@gmail.com](mailto:royenherman@gmail.com)  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah  
Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa  
"APMD" Yogyakarta

Dengan ini memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**"Kerja Sama Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Studi Di Desa Tang Badui, Kecamatan Krayan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara"**

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*)

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 17 Februari 2025

Yang Menyatakan

  
Royen  
18520039

## MOTTO

“Serahkan Perbuatanmu Kepada Tuhan, Maka Terlaksanalah Rencanamu”  
(Amsal 16:3)

"Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan."  
(Yesaya 41:10)

*“It Is Easier To Resist At The Beginning Than At The End”*  
“Lebih Mudah Menolak di Awal Daripada di Akhir”  
(Leonardo Da Vinci)

*“Was Du Erlebst, Kann Keine Macht Der Welt Dir Rauben”*  
“Tidak Ada Satu Kekuatan Pun Di Bumi Ini Yang Bisa Merampas Darimu  
Pengalaman Hidup Yang Sudah Kamu Jalani”  
(Victor E. Frankl)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka saya dapat menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan penuh sukacita. Saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang berarti dalam hidup saya :

1. Kepada kedua orang tua tercinta (Ayah Herman dan Ibu Herlina) yang selalu mendoakan saya, memberikan yang terbaik untuk saya tanpa pamrih, selalu memberikan dukungan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang serta Keluarga Besar Saya yang selalu mendoakan saya.
2. Untuk teman-teman Asrama Putra Baloy Taka Nunukan (Novel, Jeff, Jack, Ayup, Yogang, Ari, Idi, Dicky, Ihan, Buas, Loiyen, Liau, Ivan, Ibus, Lapau, Ika, Tadem, Yoab, Welly, Kevin, Naldy, Magdalena) yang selalu mendukung dan menemani saya disetiap langkah perjalanan ketika suka dan duka.
3. Bang Naga (Kwon Ji Yong) yang akan selalu menjadi motivasi saya untuk terus bangun dalam kegagalan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Saya percaya tanpa pertolongan dan hikmat yang diberikan-Nya, penyusunan skripsi ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Semoga skripsi ini yang berjudul “Kerja Sama Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Studi Di Desa Tang Badui, Kecamatan Krayan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara” dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang lain.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Analius Giawa, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing terhadap skripsi ini.
4. Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A dan Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP., M.P.A sebagai Dosen Penguji I dan II yang sudah banyak memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan berbagai pengalamannya selama penulis mengenyam pendidikan.
6. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan yang sudah memberikan fasilitas Asrama Baloy Taka selama menempuh Pendidikan di STPMD “APMD” Yogyakarta.
7. Seluruh keluarga besar civitas akademik STPMD “APMD” Yogyakarta.
8. Kepala Desa beserta jajaran, serta masyarakat Desa Tang Badui yang telah memberi kemudahan bagi saya dalam menyampaikan informasi terkait kebutuhan skripsi saya.
9. Seluruh penulis dalam karya ilmiahnya yang dikutip dan menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat menjadi bahan pergulatan pembentukan pengetahuan dan memberikan asas kebermanfaat bagi warga. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu.

Yogyakarta, 17 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



**Rozen**

**18520039**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Fokus Penelitian .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Literature Review.....	11
G. Kerangka Konseptual .....	17
1. Kerja Sama .....	17
2. Pemerintah Desa.....	22
3. Partisipasi Masyarakat .....	24
4. Pembangunan Desa .....	28
H. Metode Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian .....	32
2. Unit Analisis .....	32
3. Teknik Pengumpulan Data.....	35
4. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB II PROFIL DESA.....</b>	<b>42</b>

A. Sejarah Desa Tang Badui .....	42
B. Gambaran Wilayah Desa Tang Badui.....	42
C. Potensi Sumber Daya Alam .....	44
D. Potensi Sumber Daya Manusia .....	44
E. Pemerintahan Desa.....	49
F. Visi dan Misi Arah Pembangunan Desa .....	54
G. Proses Musyawarah Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Tang Badui .....	54
H. Pembangunan Infrastruktur Jalan.....	56
<b>BAB III KERJA SAMA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA.....</b>	<b>60</b>
A. Partisipasi yang Terjadi dalam Forum Desa. ....	60
B. Komunikasi Antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan. ....	66
C. Kepercayaan ( <i>trust</i> ) Antara Masyarakat dan Pemerintah Desa. ....	70
D. Berbagi Gagasan Antara Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan. ....	74
<b>BAB IV .....</b>	<b>78</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Informan Penelitian .....	34
Tabel 2. 1 Daftar Nama Kepala Desa Tang Badui.....	49
Tabel 2. 2 Daftar Anggota Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tang Badui 2022-2027 .....	51
Tabel 2. 7 anggota lembaga BPD Desa Tang Badui.....	53
Tabel 2. 8 LKD Desa Tang Badui.....	53

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tang Badui .....	50
Bagan 2. 2 Lembaga BPD Desa Tang Badui .....	52

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Pertumbuhan Penduduk Desa Tang Badui .....	45
Grafik 2. 2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tang Badui.....	46
Grafik 2. 3 Penduduk Berdasarkan Agama.....	47
Grafik 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kantor Desa Tang Badui .....	56
Gambar 2. 2 Jalan Menuju Kantor Desa .....	56
Gambar 2. 3 Proses Pembangunan Jalan.....	57
Gambar 2. 4 Proses Pembangunan Jalan.....	58

## INTISARI

Pembangunan infrastruktur desa merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung perkembangan ekonomi lokal. Studi ini berfokus pada kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Tang Badui, Kecamatan Krayan Tengah, Kabupaten Nunukan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kerja sama antara kedua pihak dapat berjalan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan. Tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya, komunikasi yang kurang efektif serta tingkat partisipasi masyarakat yang beragam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerja sama yang terjalin antara pemerintah desa, khususnya dari aspek partisipasi masyarakat, komunikasi, kepercayaan terhadap pemerintah desa serta berbagi gagasan dalam musyawarah desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber, termasuk pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, serta masyarakat setempat yang terlibat dalam pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama pemerintah desa dengan masyarakat dalam pembangunan cukup tinggi, terutama dalam musyawarah desa yang menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dan usulan. Komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa bersifat transparan, meskipun masih terdapat kendala dalam penerapan kebijakan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa cukup kuat, didukung oleh keterbukaan dalam pengelolaan dana pembangunan. Selain itu, berbagi gagasan dalam musyawarah desa memungkinkan adanya kolaborasi dalam menentukan teknis pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci: Kerja Sama, Pembangunan Jalan, Masyarakat**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara historis sejak kemerdekaan Indonesia, pembangunan desa telah menjadi fokus perhatian pemerintah, namun strategi yang digunakan dalam pembangunan desa dari waktu ke waktu mengalami perubahan sesuai dengan periode pembangunan. Perubahan strategi merupakan bagaimana cara menemukan strategi pembangunan desa yang dipandang paling efektif. Dalam perkembangannya setelah desa mengalami sentuhan dalam pembangunan dari masa Orde Baru, Reformasi, hingga sekarang, maka desa mengalami banyak perubahan dari segi fisik maupun perubahan masyarakat desa. Perubahan fisik dapat dilihat secara kuantitas bahwa desa-desa yang terisolasi di Indonesia semakin berkurang dan perubahan masyarakat desa dari model tradisional menuju masyarakat modern. Desa bukan lagi sebagai suatu komunitas yang statis dan konservatif dalam hal pembangunan, tetapi desa saat ini sudah mulai bergerak menuju desa modern yang masyarakatnya terlibat aktif dalam pembangunan desa.

Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional karena desa memiliki peran vital sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan peran yang strategis ini, pembangunan desa tidak hanya bertujuan untuk

mengurangi kemiskinan, tetapi juga mencakup peningkatan berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta pengelolaan sumber daya alam. Desa memiliki potensi yang besar untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang dapat mendukung kesejahteraan nasional, khususnya jika dikelola dengan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Perubahan perspektif dari membangun desa saat ini sudah mulai bergeser ke desa membangun. Membangun desa adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di luar desa atau supra desa dengan melibatkan masyarakat yang berlokasi di desa. Pembangunan desa terutama dilakukan untuk mengembangkan kawasan-kawasan atau pembangunan yang melibatkan beberapa desa. Sedangkan desa membangun diartikan sebagai menempatkan desa sebagai subyek pembangunan, yang dalam hal ini desa sebagai pihak yang merencanakan, melaksanakan sekaligus sebagai penerima manfaat dari pembangunan. Pemerintah yang lebih tinggi bertugas membina, memperkuat, dan mengawasi.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberikan hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah desa. Amanat dalam Undang-Undang Desa ini memberi perubahan dalam kebijakan tata kelola pemerintahan desa secara lokal. Desa memiliki dua asas yaitu Asas

Rekognisi yang merupakan pengakuan yang diberikan oleh negara terhadap hak desa yang dimana hak untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat usaha ekonomi desa. Sedangkan, asas subsidiaritas merupakan suatu penetapan kewenangan atau pengambilan suatu keputusan berskala lokal di mana digunakan untuk kepentingan desa. Kedua asas yang dimiliki desa ini memberi tugas dan tanggung jawab pemerintah desa menjadi lebih berat karena desa harus mengatur serta mengurus kepentingannya secara mandiri.

Berdasarkan Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, desa memiliki beberapa sumber pendapatan. Beberapa sumber pendapatan desa tersebut antara lain Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa yang berasal dari APBN, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan.

Pembangunan desa sering kali menitikberatkan pada penyediaan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, air bersih dan listrik. Infrastruktur yang memadai memainkan peran kunci dalam meningkatkan konektivitas dan kelancaran aktivitas sosial maupun ekonomi. Selain itu, pengembangan sektor ekonomi lokal, seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sektor pertanian, serta pariwisata berbasis potensi lokal yang menjadi langkah penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Pembangunan desa juga

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan aktif mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program pembangunan.

Namun demikian, pembangunan desa tidak terlepas dari tantangan yang kompleks. Keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam mengelola program dan keuangan sering kali menjadi hambatan utama. Selain itu, masih banyak desa, terutama di wilayah tertinggal yang menghadapi masalah kesenjangan infrastruktur. Tantangan lainnya termasuk politisasi dalam proses pengambilan keputusan, penyalahgunaan dana desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Meskipun proses pembangunan desa memiliki banyak tantangan, pembangunan desa tetap menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan kebijakan yang mendukung, tata kelola yang transparan dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang efektif, desa memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan lokal yang tangguh dan berkelanjutan. Pembangunan desa memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Perubahan pembangunan desa merujuk pada proses transformasi yang terjadi di desa dalam berbagai aspek kehidupan,

termasuk infrastruktur, ekonomi, sosial dan lingkungan. Perubahan ini biasanya dipicu oleh kebijakan pemerintah, inisiatif lokal, serta perkembangan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan perubahan signifikan yang terjadi dalam pembangunan desa, peningkatan infrastruktur menjadi suatu hal yang paling mendapatkan perhatian khusus, peningkatan infrastruktur dalam hal ini seperti jalan desa, jaringan listrik dan air bersih, fasilitas umum, dan lain-lain.

Kepala Desa menurut Undang-Undang nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 menyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain itu, kepala desa harus melakukan pembinaan dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat desa dengan mengoordinasikan masyarakat dalam pembangunan desa secara partisipatif. Kepala desa dalam proses pembangunan desa menjadi aktor yang sangat krusial sebagai pemegang mandat dari masyarakat desa. Kepala desa harus memiliki kecakapan dalam membuka ruang diskusi pada musyawarah desa dengan masyarakat sehingga masyarakat memiliki rasa keterlibatan dalam pembangunan desa.

Pelaksanaan pembangunan desa, Badan Permusyawaratan Desa bekerja sama dengan pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai penyelenggara utama dan bertugas memfasilitasi jalannya musyawarah desa untuk membahas rencana pembangunan, usulan kegiatan, hingga evaluasi kebijakan desa yang berasaskan musyawarah mufakat, keadilan, keterbukaan, transparan, akuntabel, partisipatif, demokratis dan kesetaraan. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa menyatakan bahwa pelaku musyawarah desa terdiri atas pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Kerja sama pemerintah desa dengan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa menjadi langkah yang strategis untuk bersama-sama melangkah menuju desa membangun. Dalam proses pembangunan desa, masyarakat desa berkewajiban untuk mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pembangunan desa yang baik dengan cara terlibat secara aktif dalam pembangunan desa yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan

guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Kerja sama pemerintah desa dengan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah ketimpangan antar desa. Dalam kerja sama ini, pemerintah desa berperan dalam memberikan fasilitasi kepada masyarakat, memberikan arahan yang baik kepada masyarakat tentang tujuan penting pembangunan. Sedangkan, masyarakat berperan untuk berpartisipasi secara aktif seperti menyumbangkan pemikiran, menyumbangkan tenaga dalam proses pembangunan desa.

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai tindakan pemerintah yang sering dikenal dengan istilah *governing* dalam pendekatan Mazhab Timoho. Konsep *governing* melihat bagaimana peran pemerintah yang memiliki otoritas sebagai legitimasi untuk menjalankan roda pemerintahan (Yunanto, 2021). Dalam perspektif kajian Ilmu Pemerintahan (IP), kebijakan yang menjadi objek studi mencakup isi atau konten kebijakan serta dampak atau konsekuensi yang dihasilkannya. Kebijakan yang dimaksud merujuk pada tindakan atau perilaku pemerintah (*governing*). Dengan demikian, *governing* melibatkan proses yang bersifat politis, legal dan administratif.

Kajian ini berangkat dari refleksi atas beberapa hal berikut: Pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah memberikan legitimasi terhadap konsep otonomi desa. Namun,

dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Hal ini terlihat dari adanya pemisahan kewenangan yang datur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua, salah satu tujuan utama dari pembangunan desa adalah mempercepat peningkatan kualitas pembangunan desa. Ketiga, implementasi pembangunan desa sering kali menyimpang dari tujuannya, karena lebih banyak didorong oleh kepentingan politik dan bisnis daripada oleh inisiatif masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada level desa sebagai unit kajian utama, mengingat desa adalah organisasi pemerintahan terkecil dan paling dekat dengan masyarakat (Eko, et al., 2014). Desa dianggap sebagai unit pemerintahan terkecil karena memiliki cakupan wilayah dan tanggung jawab yang lebih sempit dibandingkan dengan kabupaten atau kota. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, desa berada di tingkat paling bawah karena memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti sosial, budaya, dan ekonomi. Selain itu, desa dipandang paling dekat dengan masyarakat karena secara administratif dan geografis, pemerintahan desa memiliki akses yang mudah serta hubungan yang erat dengan warga. Dalam konteks ini, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana kerja sama pemerintah desa dengan masyarakat desa di salah satu desa

yang berada di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Desa Tang Badui merupakan salah satu desa tertinggal yang berada di Kecamatan Krayan Tengah. Desa Tang Badui berjarak 8 Km dari kecamatan.

Secara keseluruhan, kerja sama pemerintah desa dengan masyarakat Desa Tang Badui dalam melakukan pembangunan bersama sudah terjalin dengan baik, namun masih terdapat beberapa masalah ketika proses pembangunan khususnya ketika pelaksanaan pembangunan. Ketika pelaksanaan pembangunan, masih terdapat masyarakat yang melakukan protes kepada pemerintah desa bahwa pembangunan tidak sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat, padahal masyarakat tersebut ikut dalam musyawarah desa ketika membahas perencanaan pembangunan. Dari data empiris yang didapatkan oleh peneliti, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana relasi yang dibangun antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam mencari jalan keluar dari permasalahan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tang Badui.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Kerja sama Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Tang Badui?”

### **C. Fokus Penelitian**

1. Partisipasi Yang Terjadi dalam Forum Desa.
2. Komunikasi antara Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan.
3. Kepercayaan (*trust*) antara Masyarakat dan Pemerintah Desa.
4. Berbagi Gagasan Antara Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah dinyatakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kerja sama pemerintah desa dengan masyarakat desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tang Badui, Kecamatan Krayan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini bergerak pada dua sudut pandang, yaitu manfaat teoritik dan manfaat praktik. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya dikursus tentang pemerintahan desa dalam bidang studi Ilmu Pemerintahan. Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan warna teoritik dalam

ruang akademik tentang konsep tata kelola desa ataupun desa dan pembaharuan. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan rujukan dalam misi akademik Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menghormati, memuliakan, dan mencerahkan praktik pemerintahan di Indonesia.

Sementara secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi pemerintah desa Tang Badui sebagai bahan monitoring dan evaluasi dalam melihat pelaksanaan pembangunan desa. bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan penjelasan untuk mengetahui tugas dan fungsi pemerintah desa dalam pembangunan desa.

## **F. Literature Review**

Pada literature review ini, peneliti akan menggambarkan beberapa penelitian mengenai Kerja sama antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Halisah, Andi Syafira, dkk berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur sebagai Upaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten

Polewali Mandar”, yang dimuat dalam Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih belum optimal, macetnya pembangunan desa disebabkan pemerintah desa yang belum dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan perangkat desa lainnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky A. Prosojo, Luluk Fauziah yang berjudul “Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo” yang dimuat dalam Skripsi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo serta melihat bagaimana

faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede cukup baik dan seimbang. Hal ini ditunjukkan dengan kerjasama yang terjadi bersifat mutualistik dimana pihak yang terlibat saling memahami posisi dan perannya dalam pembangunan desa. pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan, masyarakat berperan dalam menyumbangkan pemikiran, tenaga, hingga harta benda untuk demi keberhasilan pembangunan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Deni Saputra, Imam Sunarto, dkk yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan Di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember” yang diterbitkan dalam Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah Nomor 2 Volume 6 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, jenis dan sumber data dalam penelitian diambil dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data

dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kemiri Kecamatan Panti. Temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur jalan antar dusun di desa kemiri. Hal ini terjadi karena dua Dusun Kemiri belum memiliki infrastruktur jalan yang memadai seperti jalan aspal yang rusak, pembangunan yang belum merta dan jalan tanah yang becek ketika hujan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan infrastruktur jalan di Desa Kemiri dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu penyampaian komunikasi, kejelasan dan konsistensi komunikasi yang baik, adanya sumber daya yang memadai, adanya disposisi yang memiliki komitmen dan tanggung jawab serta struktur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Moch Risdian Sujani yang berjudul “Strategi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Dewasari, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis” yang dimuat dalam Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan pemerintahan desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya hambatan yang terjadi dalam mengundang atau mengajak masyarakat untuk menggali potensi yang ada.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siprianus Uumbu yang berjudul “Strategi Pemerintah Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa (Studi Kasus di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kotabatu) yang dimuat dalam Disertasi Doktorat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pembangunan yang dilakukan masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kerja sama yang baik dari pemerintah desa dengan masyarakat sehingga menjadi penghambat dalam melakukan pembangunan jalan, sehingga perlu untuk ditingkatkan kerja sama antara pihak pemerintah desa dan masyarakat setempat.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Mastuti, Abdul Chalik dkk yang berjudul “Dampak Pembangunan Jalan Desa Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat” yang dimuat dalam Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin Volume 3, Bulan

September Tahun 2021. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan kuisioner, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Desa Simpang Empat merupakan program revitalisasi fungsi transportasi yang dilakukan sesuai standar Kementerian PUPR. Pelaksanaan proyek pembangunan fisik jalan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai tenaga kerja dengan menggunakan sumber daya setempat. Pembangunan jalan tersebut memberikan dampak yang positif terhadap perubahan kondisi sosial masyarakat.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Marsiana Fidilu, Margaretha Herlince dkk, yang berjudul “ Menjalin Kerja Sama Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan di Kalurahan Condongcatur” yang dimuat dalam Indonesian Journal of Community Empowerment Volume 1, Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat cukup aktif meskipun belum mampu memberikan data dan informasi yang komprehensif. Pemerintah Kecamatan Condongcatur dan masyarakat sudah memahami kegiatan pembangunan yang dilakukan setiap tahunnya. Dalam penelitian

ini ditemukan adanya kendala yaitu kurangnya dana anggaran dan belum optimalnya kesadaran masyarakat yang terbangun.

Berdasarkan literature review di atas yang menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih terdapat beberapa hal yang masih perlu di kaji lebih dalam, hasil dari beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan masih kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan kerja sama dalam mempercepat pembangunan yang ada di desa dengan melibatkan masyarakat. Hal ini disebabkan pemerintah terkadang mengabaikan dan bersikap diam dalam menyikapi permasalahan pembangunan yang ada di desa.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, pada penelitian ini, peneliti berfokus bagaimana kerja sama Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa. Posisi dari penelitian ini mengambil sudut pandang yang berbeda yaitu menambah kekayaan diskursus penelitian dengan lokasi penelitian yang baru.

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Kerja Sama**

Secara umum, kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.

Manusia sebagai makhluk *zoon politicon* atau manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dipisahkan dengan komunitasnya. Artinya adalah antara manusia satu dengan manusia yang lainnya saling hidup berdampingan dan saling ketergantungan satu dengan yang lain dalam melakukan segala aktivitas dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Menurut Tangkilisan (dalam A.N Ramadhan 2016:11) menyebutkan bahwa kerja sama adalah semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi yang dapat mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing individu untuk mencapai tujuan.

Charles H. Cooley (dalam Imam, 2012:61), Kerja sama timbul apabila individu menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan.

Menurut Zainuddin (dalam Alfian Muhtar dkk, 2022:231), kerja sama merupakan sifat kepedulian terhadap satu orang atau satu pihak dengan orang atau pihak yang lain dengan dilandasi adanya prinsip saling percaya dan menghargai.

Menurut Rahaja dalam M. Haasir dkk (2022:260) kerja sama merupakan sebuah bentuk kolaborasi yang membutuhkan bantuan dari pihak lainnya. Menurut Rosyida, dkk dalam Nina Karlina (2022:260) supaya proses kerja sama atau kolaborasi dapat berjalan dengan baik, maka ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam kegiatan kerja sama, yaitu:

- a. Partisipasi (*Participation*), hal ini berkaitan dengan keterlibatan, mendukung dan bertanggung jawab baik secara mental maupun emosi dalam kegiatan dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan.
- b. Komunikasi (*Communication*), hal ini berkaitan dengan koordinasi atau komunikasi pemerintah dan masyarakat dalam pertukaran informasi terkait kebijakan, ide atau gagasan serta keputusan antara pemerintah dan pihak yang bersangkutan.
- c. Percaya (*Trust*), dalam kerja sama keterbentukan rasa kepercayaan sangat menjadi unsur penting dalam mencapai sebuah tujuan bersama.
- d. Berbagi (*Share*), dalam hal ini berkaitan dengan sikap saling memahami dan menghargai dalam melakukan kegiatan kerja sama dengan maksud tujuan bersama dapat tercapai.

Kerja sama pada dasarnya tercermin dari adanya kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang bertujuan untuk saling

memberikan manfaat. Kerja sama adalah kegiatan kolektif yang dilakukan secara terkoordinasi dan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian kerja sama di atas, maka ada beberapa aspek yang terkandung dalam kerja sama, antara lain:

- a. Dua orang atau lebih, artinya kerja sama dapat terjalin karena melibatkan dua pihak yang bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Keberhasilan dan kesuksesan dari kerja sama ini bergantung pada kedua pihak atau individu yang terlibat dalam proses tersebut.
- b. Aktivitas, dalam hal ini menunjukkan bahwa kerja sama dapat terjadi karena adanya kegiatan yang disepakati bersama, yang kemudian digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu dan memerlukan penerapan strategi.
- c. Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerja sama usaha tersebut. Dalam hal ini biasanya keuntungan baik secara finansial maupun non finansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua belah pihak.
- d. Jangka waktu tertentu, dalam hal ini menunjukkan bahwa kerja sama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya adanya kesepakatan antara kedua belah pihak kapan kerja sama itu berakhir.

Selain itu, kerja sama memiliki manfaat dalam mencapai tujuan bersama, antara lain:

- a. Kerja sama mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas.
- b. Kerja sama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif dan efisien.
- c. Kerja sama mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya operasionalisasi akan menjadi semakin rendah yang menyebabkan kemampuan bersaing meningkat.
- d. Kerja sama mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara pihak yang terkait serta meningkatkan rasa kesetiakawanan.
- e. Kerja sama menciptakan praktik yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok.
- f. Kerja sama mendorong keikutsertaan serta saling memiliki situasi dan keadaan yang terjadi di lingkungannya, sehingga secara otomatis akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang telah baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses kerja sama perlu didasari oleh kesadaran serta prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Keuntungan di sini tidak berarti bahwa kedua belah pihak harus memiliki kekuatan atau kemampuan yang setara, atau memperoleh manfaat dalam porsi yang

sama. Sebaliknya, setiap pihak diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memainkan peran sesuai dengan kapasitas serta potensi masing-masing, sehingga keuntungan maupun kerugian yang muncul dapat dibagi secara sepadan.

## **2. Pemerintah Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian desa mencakup desa adat yang dikenal sebagai Desa. Dalam struktur desa, terdapat kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Pengelolaan tersebut didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa perlu adanya keterlibatan dari seluruh aktor masyarakat dan yang paling utama adalah Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mencakup berbagai aspek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang meliputi: penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan dalam pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Pasal 1 ayat 2 dan 3 menetapkan mengenai pengertian pemerintah desa sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat banyak yang ada dalam wilayah setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- 2) Pemerintah Desa memiliki kepala desa yang di mana kepala desa dibantu dengan perangkat desa lainnya dalam urusan penyelenggaraan pemerintah desa.

Dari segala unsur yang berkaitan dalam menjalankan tugas serta wewenang kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Dalam pelaksanaannya perangkat desa dibantu oleh sekretaris desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa berdasarkan pada kewilayahan dalam pelaksanaan teknis.

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah desa adalah aktor utama dalam menjalankan serta mengembangkan tugas dan wewenang untuk mengatur berdasarkan pada prakarsa masyarakat atau kepentingan umum. Selain itu, kinerja kepala desa sebagai aktor paling utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang mampu mengendalikan serta mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di desa dalam bidang pembangunan infrastruktur desa secara

fisik.

### **3. Partisipasi Masyarakat**

Individu secara tidak langsung menjadi bagian dari komunitas ketika berkumpul dengan tujuan bersama dan memiliki kesamaan identitas. Dalam konteks ini, seseorang menjadi bagian dari masyarakat (*society*) saat berkumpul atau terlibat dalam gerakan organisasi sosial. Partisipasi masyarakat dapat terlihat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten atau kota. (Eko, 2013)

Menurut Isbandi (2007:27) partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahapan, mulai dari mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada, menentukan serta memutuskan solusi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut, hingga berperan dalam pelaksanaan upaya penyelesaiannya. Selain itu, masyarakat juga berpartisipasi dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi selama proses tersebut. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam kegiatan masyarakat (Totok & Poerwoko,

2013). Menurut Cohen dan Uphoff sebagaimana yang dikutip oleh Siti Irene Dwi Astuti (2011:61-62) partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam pembangunan suatu program terdiri dari 4 tahap, terdiri dari:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam program melalui forum yang terorganisir, di mana partisipasi anggota masyarakat daerah dalam pengambilan keputusan suatu program yang berkaitan dengan pembangunan daerah.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan merujuk pada kontribusi masyarakat berupa tenaga, materi, serta berbagai bentuk bantuan yang bermanfaat bagi anggota masyarakat lainnya. Implementasi pembangunan ini mencakup keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya tertentu untuk membimbing masyarakat dalam menjaga dan merawat hasil pembangunan agar tetap terpelihara dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, yaitu salah satu komponen penting yang sering terlupakan adalah tujuan utama dilaksanakannya pembangunan, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata. Melalui pemanfaatan hasil dari program pembangunan ini menggugah simpati, keinginan dan perhatian masyarakat untuk berpartisipasi dalam memajukan program pembangunan di daerah mereka.

d. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dan aspirasi bersama, selain itu kegiatan evaluasi pembangunan juga bermanfaat untuk mendapatkan materi tentang permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Slamet (dalam Mardikoto dan Soebianto, 2013:91-92) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan suatu program dapat tumbuh dan berkembang jika memenuhi tiga unsur utama. **Pertama**, masyarakat harus diberikan peluang untuk berpartisipasi. Peluang ini mencakup akses untuk memanfaatkan dan menggerakkan sumber daya alam maupun manusia dalam pelaksanaan pembangunan, mendapatkan informasi terkait pembangunan, serta memperoleh wewenang dalam mengelola program-program pembangunan dari tingkat pemerintah pusat hingga desa.

Faktor **Kedua** adalah adanya kemampuan untuk berpartisipasi. Kemampuan ini meliputi keterampilan dalam mengidentifikasi, memahami dan memiliki pengetahuan terkait peluang pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, kemampuan menjalankan pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, serta kemampuan menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. **Ketiga**, adanya kemampuan untuk berpartisipasi. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh mentalitas masyarakat,

seperti sikap mandiri, percaya diri dalam melaksanakan pembangunan, kerja sama dalam menyelesaikan konflik, komitmen untuk terus meningkatkan taraf hidup dan kesediaan untuk meninggalkan nilai-nilai yang dapat menghambat proses pembangunan.

Menurut Rahardjo (dalam Theresia A, 2014:200) menyebutkan bahwa ada 3 bentuk partisipasi masyarakat, di antaranya yaitu: (a) Partisipasi Terbatas, artinya partisipasi yang hanya digerakkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu demi tercapainya tujuan pembangunan; (b) Partisipasi Penuh, yaitu partisipasi seluas-luasnya dari berbagai aspek kegiatan pembangunan; (c) Mobilisasi Tanpa Partisipasi yang artinya partisipasi yang dibangkitkan oleh pemerintah dalam hal ini penguasa, tetapi masyarakat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mempertimbangkan kepentingan pribadi dan tidak diberi kesempatan untuk turut mengajukan maupun mempengaruhi jalannya kebijakan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi adalah proses keterlibatan dari beberapa unsur individu yang dalam hal ini adalah masyarakat desa untuk mencapai sebuah tujuan bersama yang seluas-luasnya untuk kesejahteraan bersama. Selain itu, tinggi rendahnya partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh rasa memiliki dan kesadaran masyarakat untuk membangun wilayah tempat mereka tinggal.

#### **4. Pembangunan Desa**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat (1) menyebutkan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pembangunan yang berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan desa menjadi salah satu topik penting yang perlu dibahas di berbagai kalangan sebagai bagian dari kajian untuk keberlangsungan hidup manusia. Fenomena ini telah menjadi ciri khas kehidupan manusia yang terus mengalami perubahan dalam berbagai dimensi waktu. Secara konsep, pembangunan dapat diartikan sebagai bentuk perubahan yang dirancang melalui proses perencanaan, perubahan tersebut harus bersifat nyata agar mampu memberikan dampak positif, baik untuk individu maupun kelompok masyarakat secara luas yang terbentuk berdasarkan nilai-nilai tertentu. Selain itu, pembangunan bertujuan untuk memperbaiki kondisi dari yang sebelumnya belum optimal menjadi lebih baik. Melalui proses pembangunan yang berkelanjutan, diharapkan berbagai masalah yang

ada dalam masyarakat dapat diatasi secara efektif.

Pembangunan yang berfokus pada skala lokal atau desa merupakan elemen penting dari proses pembangunan nasional. Dalam konteks ini, pembangunan desa berperan strategis untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat umum. Selain itu, perubahan yang terjadi dalam proses pembangunan desa menjadi indikator sekaligus nilai penting bagi masyarakat setempat. Pembangunan desa memiliki posisi yang sangat vital karena sifatnya yang tak terpisahkan dari pembangunan di tingkat daerah maupun nasional.

Desa merupakan entitas geografis yang menjadi garda terdepan dengan struktur pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat luas. Sebagian besar penduduk dan bermukim di desa, sehingga setiap program kerja pemerintah desa harus berorientasi pada desa dan masyarakat sebagai fokus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, pembangunan desa merupakan sebuah proses perubahan yang berlangsung terus menerus untuk menciptakan keseimbangan dalam upaya menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Secara konkret, pembangunan desa harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dasar memperkuat ketahanan desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 2 menetapkan bahwa:

- 1) Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- 2) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.
- 3) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental yang ditujukan kepada masyarakat untuk melayani dan memudahkan masyarakat. Menurut Kuncoro (2010:20), infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi air, bangunan dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa infrastruktur, bangunan, fasilitas umum dan lainnya.

Infrastruktur memiliki peran krusial sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang mendasar, fasilitas dan sarana fisik yang sering disebut sebagai

infrastruktur merupakan elemen yang esensial dalam sistem pelayanan masyarakat. Infrastruktur yang berkualitas memiliki fungsi signifikan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti kebutuhan primer dan sekunder. Oleh karena itu, infrastruktur dapat dianggap sebagai aset penting yang diperlukan untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat di berbagai sektor. Pembangunan infrastruktur yang baik akan membawa dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa dirancang untuk melayani kebutuhan masyarakat, dengan hasilnya diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga desa. Pada akhirnya, hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian selalu menggunakan metode yang teruji dan dipakai secara keseluruhan untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat dan akurat, sehingga hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan langsung bagi permasalahan yang dihadapi, karena penelitian merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Penelitian sendiri merupakan suatu cara untuk menjawab dan menggambarkan suatu fenomena yang sedang terjadi secara ilmiah. Dalam Azwar (2015:2) menjelaskan bahwa penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap

permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

## **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, mencakup perilaku, motivasi, tindakan dan persepsi yang disajikan dalam bentuk deskripsi berupa kata-kata dan bahasa (Moleong, 2018:6). Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan karena untuk memperoleh gambaran (keterangan) yang lebih akurat dan mendalam berkaitan dengan konteks permasalahan yang dikaji.

Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan lebih dalam secara keseluruhan dan luas tentang bagaimana kerja sama pemerintah desa dengan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tang Badui.

## **2. Unit Analisis**

### **a. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan titik yang menjadi pusat pengamatan karena peneliti ingin melakukan pengamatan dan ingin memperoleh informasi mengenai hal tersebut (Arikunto 2009:20). Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah melihat

bagaimana kerja sama yang dibangun oleh pemerintah desa dengan masyarakat desa dalam hal pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Tang Badui, Kecamatan Krayan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

#### b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari Pemerintah Desa di Tang Badui dan Masyarakat Desa Tang Badui, Kecamatan Krayan Tengah. Pemilihan subjek penelitian tersebut dilatarbelakangi karena adanya keterkaitan atau hubungan dengan objek penelitian, penentuan informan menggunakan teknik purposive yaitu mengambil narasumber data berdasarkan kriteria yang dianggap relevan untuk dapat memberikan informasi mengenai kerja sama pemerintah desa dengan masyarakat desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tang Badui.

Deskripsi karakteristik informan dalam penelitian ini meliputi nama, jenis kelamin, pekerjaan dan usia. Informan dipilih berdasarkan kriteria dan sesuai dengan memiliki tugas dan kapasitas untuk memberikan informasi berupa data yang berhubungan dengan objek penelitian. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 14 orang yang terdiri sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Herman Liu	Kepala Desa	Laki-Laki	SMP
2	Yeni Rosita	Sekretaris Desa	Perempuan	S1
3	Ronsono Samuel	Bendahara Desa	Laki-Laki	SMA
4	Juen	Kepala Seksi Pemerintahan	Laki-Laki	SMA
5	Darles	Kepala Seksi Kesejahteraan	Laki-Laki	D3
6	Ramli Ade	Kepala Urusan Perencanaan	Laki-Laki	SD
7	Albert Darius	Ketua BPD	Laki-Laki	S1
8	Joko Pendawa	Anggota BPD	Laki-Laki	SMA
9	Jhon Samuel	Wakil Adat	Laki-Laki	SMA
10	Hernos Langub	Masyarakat	Laki-Laki	SD
11	Okta Alang	Masyarakat	Perempuan	SD
12	Herlina	Masyarakat	Perempuan	SD
13	Mohani Habia	Masyarakat	Laki-Laki	SD
14	Norma	Masyarakat	Perempuan	SD

Sumber: Data Primer Penelitian

### c. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, istilah informan digunakan untuk merujuk pada individu yang diwawancarai secara mendalam terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap relevan untuk memberikan informasi penting mengenai objek penelitian. Pada penelitian ini, informan dipilih menggunakan teknik purposive yaitu metode pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria atau alasan tertentu. Afifudin (2012:130)

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi (Yusanto, 2019) sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan dan pencatatan yang dilakukan pada awal penelitian, dilakukan dengan cara mengamati keadaan lingkungan dan perilaku individu. Dalam penelitian ini, yang akan diteliti adalah Kerja sama Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Jalan di Desa

Tang Badui, Rachmawati (2019). Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, objek, kondisi atau suasana tertentu. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Rahardjo (2011:3).

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mengamati keterlibatan masyarakat dalam kerja sama yang dibangun oleh Pemerintah Desa Tang Badui dalam hal pembangunan infrastruktur jalan desa. Pengamatan ini meliputi tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa, komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dengan masyarakat ketika pembangunan, kepercayaan yang terbangun antara masyarakat dan pemerintah desa dalam hal penggunaan anggaran untuk pembangunan dan berbagi gagasan yang terjadi ketika perencanaan pembangunan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi tanya jawab secara langsung dengan sejumlah informan yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi secara langsung terkait permasalahan yang

menjadi fokus penelitian. Dalam wawancara, peneliti menggali sedalam mungkin data yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Rachmawati (2019)

Pada penelitian ini, sebelum peneliti melaksanakan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara langsung ke lokasi penelitian untuk bertemu dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya dan melakukan wawancara secara mendalam.

Pada penelitian ini, peneliti memilih informan atau narasumber dengan alasan sebagai berikut:

a) Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Tang Badui memiliki wewenang untuk melakukan pembangunan desa, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan infrastruktur jalan desa. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengikut sertakan masyarakat dalam melakukan kegiatan, dengan melibatkan pemerintah desa, peneliti dapat memperoleh gambaran bagaimana kerja sama yang dibangun Pemerintah Desa Tang Badui dengan masyarakat dalam konteks pembangunan

infrastruktur jalan desa.

b) Masyarakat

Masyarakat dipilih sebagai informan penelitian ini karena masyarakat adalah pihak yang secara langsung terlibat dan merasakan dampak dari adanya pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tang Badui. Dengan melibatkan masyarakat sebagai informan, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai keterlibatan masyarakat dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan infrastruktur jalan desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah aktivitas pengumpulan sumber-sumber data tertulis di lapangan yang berhubungan dengan isu yang sedang diteliti. Studi dokumentasi dapat digunakan untuk tujuan menguji, menganalisis hingga membuat prediksi. Dokumentasi dapat berupa teks, gambar atau karya monumental seseorang, contohnya seperti catatan harian, sejarah hidup, narasi, biografi, peraturan serta kebijakan.

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi yang digunakan untuk mencari beberapa data sekunder yang terkait dengan penelitian mengenai bagaimana Kerja

sama Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Tang Badui, Kecamatan Krayan Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan studi dokumentasi yaitu:

1. RPJMDES
2. Profil Desa
3. APBD

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan langkah penting dalam mengolah dan menginterpretasi data yang telah dikumpulkan agar menjadi informasi yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam menganalisis data tekstual, pendekatan kualitatif biasanya bersifat induktif, di mana peneliti dituntut untuk mengidentifikasi pola atau tema yang relevan. Jogiyanto (2018).

Langkah-langkah dalam mengelaborasi data menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

##### **a. Reduksi Data**

Reduksi data merujuk pada proses memilah, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi,

serta mengolah data yang terdapat dalam catatan lapangan atau transkrip tertulis.

Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya melakukan identifikasi data yang relevan terkait kerja sama, melakukan penyederhanaan data seperti mengelompokkan informasi berdasarkan partisipasi, komunikasi, kepercayaan dan berbagi dalam kerja sama.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan hasil dari reduksi data seperti matriks, grafik, dan bagan.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam analisis data dapat dilakukan melalui berbagai teknik. Kesimpulan yang dihasilkan awalnya bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian, proses ini bertujuan untuk mengolah data menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan dapat dimanfaatkan untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan.

Penarikan kesimpulan dalam analisis data tidak bersifat final pada tahap awal, melainkan dapat berubah jika ada temuan baru yang lebih kuat. Proses analisis data dilakukan untuk menyederhanakan informasi yang didapat sehingga lebih mudah untuk dipahami dan digunakan untuk mencari solusi terhadap suatu masalah. Kesimpulan bersifat dinamis dan dapat diperbarui berdasarkan bukti yang ditemukan selama penelitian berlangsung.

## **BAB II**

### **PROFIL DESA**

#### **A. Sejarah Desa Tang Badui**

Desa Tang Badui berada di kecamatan Krayan Tengah, Kabupaten Nunukan. Desa Tang Badui berada di daerah pedalaman. Pada tahun 1995 terjadi perpindahan pemukiman dari pemukiman lama ke daerah pemukiman yang ditempati hingga saat ini. Di samping itu masyarakat Tang Badui merupakan masyarakat yang secara turun temurun tinggal di wilayah Tang Badui, sehingga secara adat istiadat dan budaya tidak ada perbedaan sehingga kerja sama dan kegotongroyongan terjalin dengan baik antara masyarakat Tang Badui, di mana masyarakat Tang Badui secara keseluruhan menganut agama Kristen dengan mata pencaharian petani, berkebun dan sebagiannya peternak.

#### **B. Gambaran Wilayah Desa Tang Badui**

##### **1. Batas Wilayah**

Desa Tang Badui memiliki luas wilayah 25.000 Hektare dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Long Padi
- Sebelah Timur : Desa Long Mutan
- Sebelah Selatan : Desa Pa Dalan

- Sebelah Barat : Desa Ba Liku

## **2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan**

Luas tanah Desa Tang Badui terdiri dari tanah darat dan tanah sawah serta pegunungan dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah Sawah : 152 Ha
- Tanah Ladang : 150 Ha
- Tanah Pegunungan : 230 Ha
- Tanah Perkebunan : 80 Ha
- Tanah Rawa : 38 Ha
- Hutan : 24.350 Ha

## **3. Iklim**

- Curah Hujan : 2500-3000 Mm
- Jumlah Bulan Hujan : 6 Bulan
- Kelembapan : 80-88
- Suhu Rata-Rata Harian : 15°C-25°C
- Tinggi Tempat Permukaan Laut : 1200 Mdpl

## **4. Orbitasi**

Orbitasi atau jarak dari pusat-pusat pemerintahan:

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 8 Km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 210 Km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 205 Km

### **C. Potensi Sumber Daya Alam**

#### **1. Pertanian**

##### **a. Kepemilikan Lahan Pertanian**

- Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian : 22 Keluarga
- Jumlah total keluarga : 22 Keluarga

#### **2. Perkebunan**

##### **a. Luas hasil perkebunan berdasarkan komoditas**

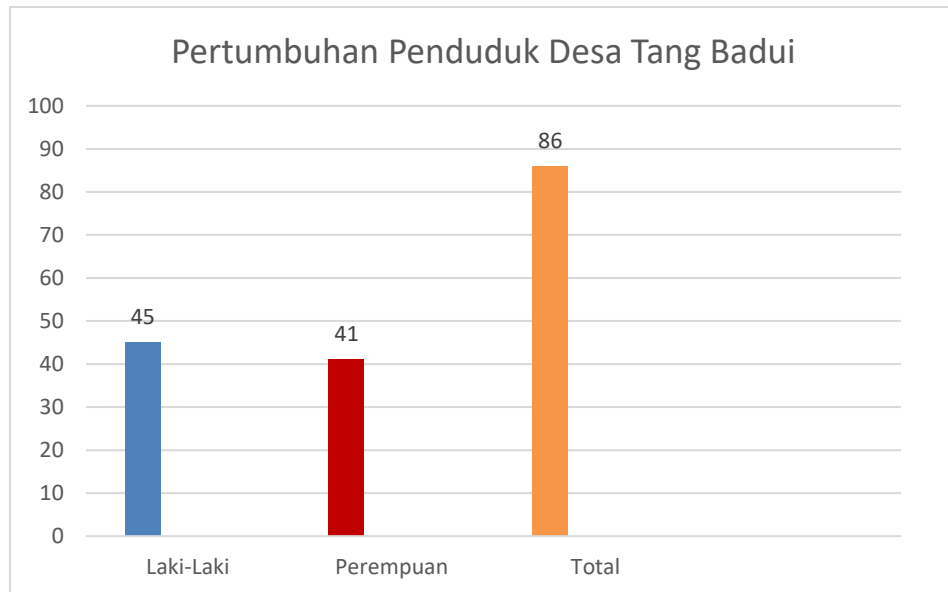
- Padi : 25 Ha
- Jagung : 15 Ha
- Ketela Pohon : 4 Ha

### **D. Potensi Sumber Daya Manusia**

#### **1. Pertumbuhan Penduduk**

Jumlah penduduk Desa Tang Badui berdasarkan Profil Desa Tahun 2023 adalah sebesar 86 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki 45 jiwa dan perempuan 41 jiwa.

**Grafik 2. 1 Pertumbuhan Penduduk Desa Tang Badui**

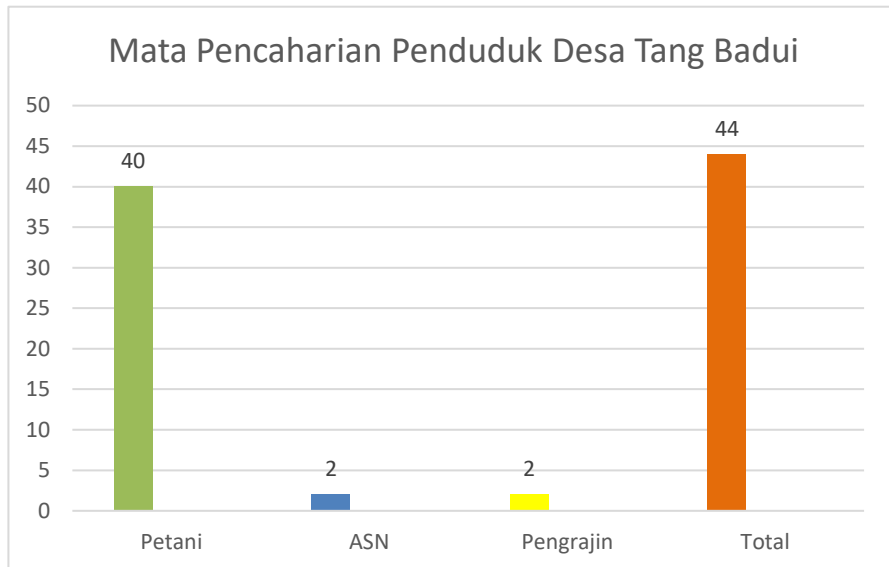


Sumber: Profil Desa Tang Badui 2023 yang Diolah Oleh Penulis

## **2. Mata Pencaharian Penduduk**

Mata pencaharian penduduk di Desa Tang Badui adalah bercocok tanam terutama pada sektor pertanian dan perkebunan. Sedangkan pencaharian lainnya adalah sektor industri kecil yang bergerak di bidang kerajinan dan pemanfaatan hasil olahan pertanian dan perkebunan.

**Grafik 2. 2 Mata Pencapaian Penduduk Desa Tang Badui**

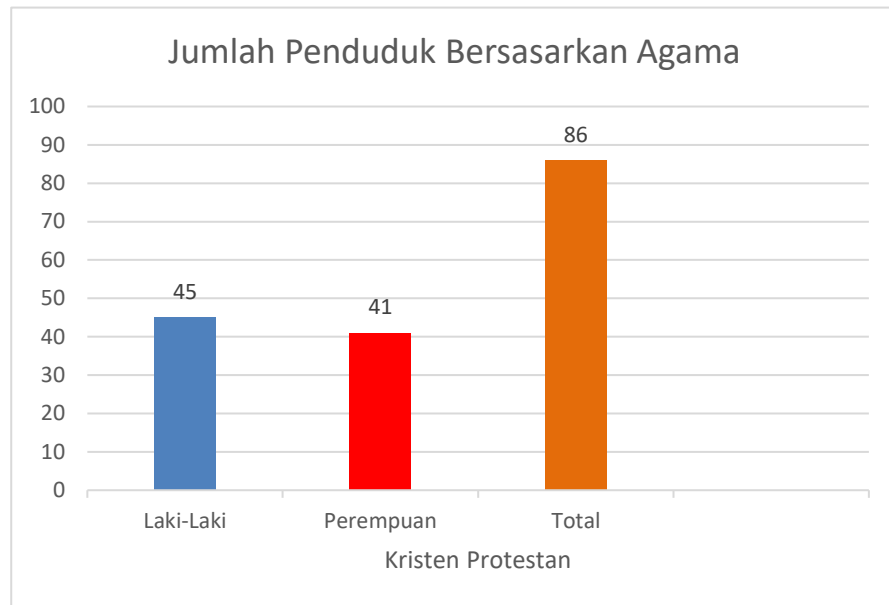


Sumber Data: Profil Desa Tahun 2023 yang Diolah Olah Penulis

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk Desa Tang Badui yang berjumlah 86 jiwa, 40 jiwa bekerja sebagai petani, 2 jiwa bekerja sebagai ASN, 2 jiwa bekerja sebagai pengrajin dan total keseluruhan yang bekerja sebanyak 44 jiwa. Sedangkan 42 di antaranya ialah anak yang belum bisa bekerja dan lansia atau usia lanjut yang sudah tidak bisa bekerja.

### 3. Penduduk Berdasarkan Agama

Grafik 2. 3 Penduduk Berdasarkan Agama

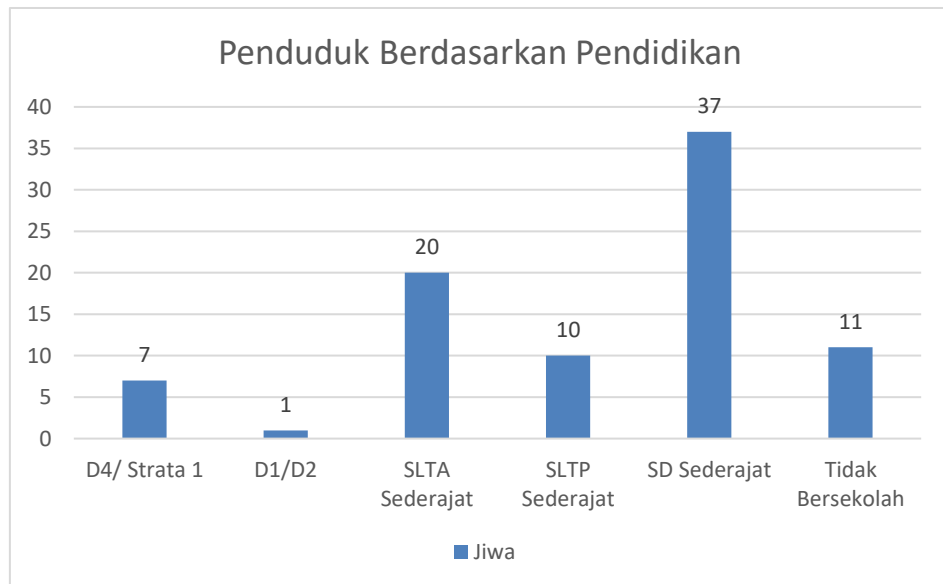


Sumber Data: Profil Desa Tang Badui 2023 yang Diolah Oleh Penulis

Penduduk Desa Tang Badui secara keseluruhan memeluk agama Kristen Protestan dan hanya memiliki 1 Gereja. Dengan demikian menjadikan keuntungan bagi pemerintah desa dalam membangun desa dapat melalui potensi kelembagaan kerohanian sebagai basis dialog guna menentukan keberhasilan pembangunan di Desa Tang Badui.

#### 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Grafik 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan



Sumber Data: Profil Data Tahun 2023 yang Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan grafik di atas, tampak jelas bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa Tang Badui adalah SD dan disusul dengan SLTA.

## **E. Pemerintahan Desa**

### **1. Kepala Desa Dari Masa Ke Masa**

Berikut adalah daftar nama kepala desa dari tahun 1965 sampai saat ini:

**Tabel 2. 1 Daftar Nama Kepala Desa Tang Badui**

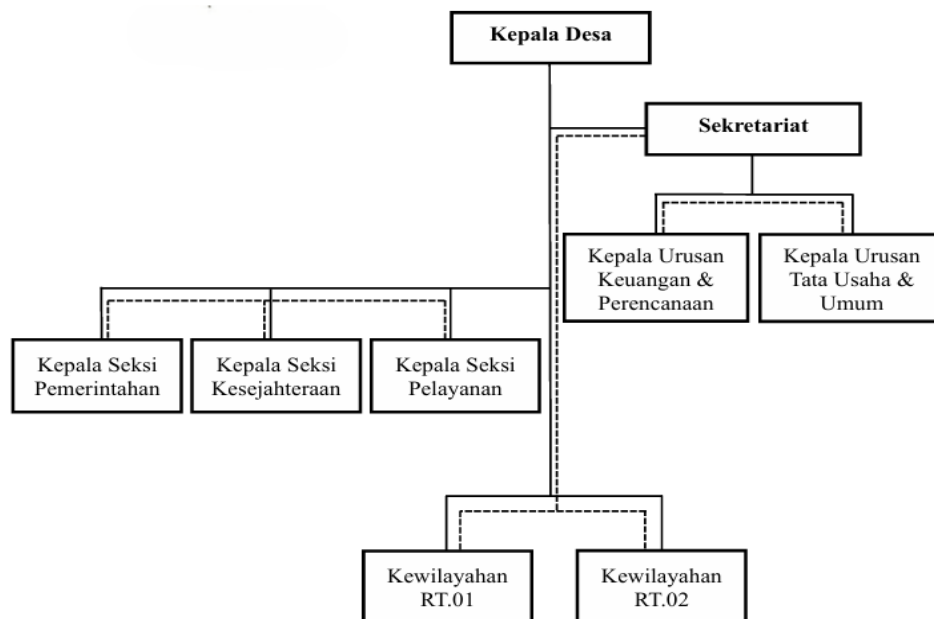
<b>No</b>	<b>Periode</b>	<b>Nama Kepala Desa</b>	<b>Keterangan</b>
1	1965-1975	Gelawat	10 Tahun
2	1975-1980	Damus	5 Tahun
3	1980-1995	Lawi	15 Tahun
4	1995-2000	Rining Liu	10 Tahun
5	2000-2014	John Samuel	5 Tahun
6	2014-2015	Pj Abner	6 Bulan
7	2015-2021	John Samuel	6 Bulan
8	2021	Pj Abner	3 Bulan
9	2022-2027	Herman	2022- Sekarang

Sumber: Profil Desa Tang Badui 2023

## 2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Tang Badui memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tang Badui



Keterangan :

———— = Garis Komando  
----- = Garis Koordinasi

Sumber: Profil Desa Tang Badui 2023

Bagan 2.1 menunjukkan tingkat jabatan pemerintah Desa Tang Badui, Kepala Desa langsung membawahi atau hubungannya bersifat komando dengan Sekretaris Desa sebagai pemimpin sekretariat, seksi (pemerintahan, kesejahteraan dan Pelayanan), serta kewilayahan rukun tetangga. Sedangkan, antar seksi bersifat koordinasi, termasuk antar kepala urusan dan kewilayahan. Kemudian sekretaris membawahi kepala urusan (tata usaha dan umum serta keuangan dan perencanaan) bersifat

komando, sedangkan antar kepala urusan hubungannya bersifat koordinasi.

**Tabel 2. 2 Daftar Anggota Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tang Badui  
2022-2027**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Herman	Kepala Desa
2	Yeny Rosita	Sekretaris Desa
3	Juen	Kepala Seksi Pemerintahan
4	Ramli	Kepala Seksi Kesejahteraan
5	Darles	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum
6	Ronsono	Kepala Urusan Keuangan Dan Perencanaan
7	Aslipin	Ketua RT

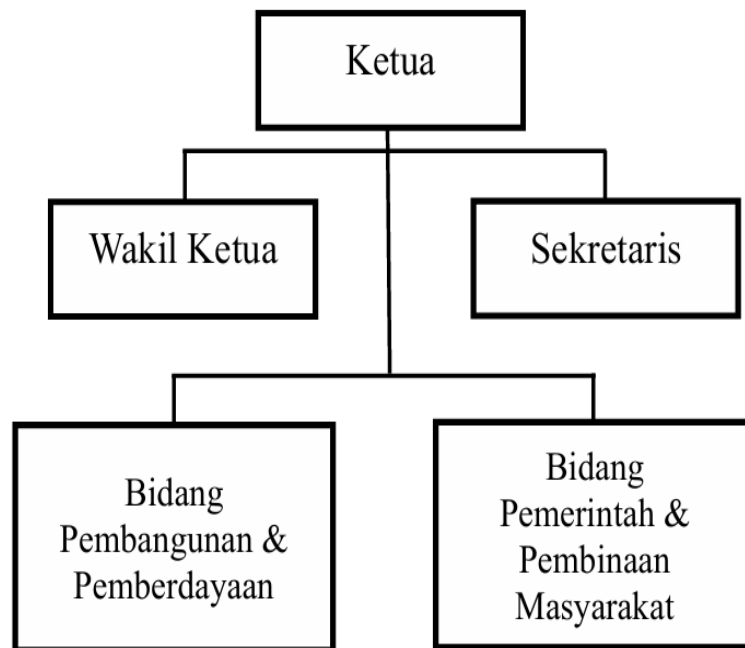
Sumber: Profil Pemerintah Desa Tang Badui 2023

Berdasarkan pada tabel 2. 6 Jumlah anggota Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tang Badui periode 2022-2027 sebanyak 7 (tujuh) orang. Jika dilihat dari perbandingan bagan dengan tabel di atas, terdapat perbedaan komposisi di bagian Kepala Seksi Pelayanan. Berdasarkan tabel yang didapat dari Profil Desa Tang Badui menunjukkan bahwa tidak ada Kepala Seksi Pelayanan dan di Desa Tang Badui hanya memiliki 1 RT.

### 3. Struktur Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tang Badui

Struktur lembaga BPD Desa Tang Badui, Kecamatan Krayan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara sebagai berikut:

Bagan 2. 2 Lembaga BPD Desa Tang Badui



Sumber: Profil Desa Tang Badui 2023

Adapun daftar anggota Badan Permusyawaratan Desa Tang Badui tahun 2022-2027 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Anggota lembaga BPD Desa Tang Badui

No	Nama	Jabatan
1	Albert	Ketua
2	Adam	Wakil Ketua
3	Bradanly	Sekretaris
4	Joko Pendawa	Anggota
5	Julita	Anggota

Sumber: Profil Desa Tang Badui 2023

#### 4. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Terdapat 5 (lima) kelembagaan masyarakat yang terdata pada Desa Tang Badui. Di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 4 LKD Desa Tang Badui

No	Nama Lembaga	Jumlah Pengurus
1	PKK	3
2	Karang Taruna	3
3	RT	1
4	Kelompok Tani	3
5	Pengrajin	2

Sumber Data: Profil Desa Tang Badui 2023

## **F. Visi dan Misi Arah Pembangunan Desa**

### **1. Visi**

“Bersama-sama meningkatkan pembangunan dan perekonomian untuk mewujudkan perubahan Desa Tang Badui menjadi lebih baik”

### **2. Misi**

- 1) Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal ataupun informal.
- 2) Bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian
- 3) Meningkatkan usaha pertanian
- 4) Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa
- 5) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi daerah.

## **G. Proses Musyawarah Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Tang Badui**

Musyawarah yang dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tang Badui melalui musyawarah sebanyak 2 (dua) kali, pertemuan pertama meliputi seluruh aparat desa dengan lembaga kemasyarakatan desa yang berlokasi di kantor desa untuk membahas perencanaan pembangunan. Dalam musyawarah ini kepala desa

sebagai pimpinan pertemuan menjelaskan maksud dan tujuan adanya pembangunan kepada lembaga desa, lembaga adat dan seluruh elemen masyarakat. Dalam pertemuan pertama ini, lembaga desa dan lembaga adat sebagai perwakilan dari masyarakat bertugas untuk menjelaskan kepada masyarakat. Pertemuan ini menghasilkan usulan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu pembangunan infrastruktur jalan, hasil pertemuan ini selanjutnya ditinjau oleh BPD untuk dilihat kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat atau tidak.

Setelah musyawarah pertama yang dilakukan oleh aparat desa, pemerintah desa bersama BPD membuka forum kembali yang bersifat musyawarah desa dengan seluruh masyarakat Desa Tang Badui, hal ini bertujuan untuk memperjelas tujuan diadakannya pembangunan tersebut dengan masukan dan kritikan dari masyarakat, diharapkan pembangunan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## H. Pembangunan Infrastruktur Jalan



Gambar 2. 1 Kantor Desa Tang Badui



Gambar 2. 2 Jalan Menuju Kantor Desa



Gambar 2. 3 Proses Pembangunan Jalan



Gambar 2. 4 Proses Pembangunan Jalan

Gambar 2.1 menunjukkan kantor Pemerintah Desa Tang Badui beserta akses jalan yang ditampilkan pada Gambar 2.2. Sebelum adanya pembangunan, jalan menuju kantor Desa Tang Badui dalam kondisi yang kurang memadai, terutama saat hujan, mengingat Desa Tang Badui memiliki curah hujan yang tinggi. Akibatnya, akses menuju kantor desa menjadi sulit, sehingga menghambat pelayanan perangkat desa kepada masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Desa Tang Badui bekerja sama dengan masyarakat dalam pembangunan jalan desa. Melalui musyawarah desa, masyarakat dan pemerintah desa sepakat untuk bergotong royong dalam proses pembangunan, seperti yang terlihat pada Gambar 2.3 dan 2.4. Pemerintah desa mengalokasikan dana pembangunan dari anggaran desa serta mendapatkan dukungan dari pihak terkait, sementara masyarakat turut berpartisipasi dengan tenaga dan sumber daya yang tersedia. Dengan adanya kerja sama ini, pembangunan jalan dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga akses menuju kantor desa menjadi lebih baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

### **BAB III**

#### **KERJA SAMA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA**

Dalam bab 3 (tiga) berisi analisis penulis terhadap olahan data-data yang ditemukan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang akan dijabarkan dalam bab ini adalah upaya untuk mengungkap makna dibalik kerja sama pemerintah desa dengan masyarakat desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa. Rosyida dalam Nina Karlina (2022) memaknai kerja sama dengan 4 (empat) prinsip agar kolaborasi kerja sama dapat berjalan dengan baik.

##### **A. Partisipasi yang Terjadi dalam Forum Desa.**

Pembangunan infrastruktur jalan desa merupakan penunjang utama bagi perputaran perekonomian antar daerah maupun di dalam desa, selain itu juga untuk menjamin akses transportasi darat dalam menjangkau keberadaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik secara sosial maupun ekonomi itu sendiri. Keberadaan Pemerintah Desa Tang Badui sebagai penyelenggara pemerintahan di desa memiliki peran yang sangat vital dalam menjamin kesejahteraan maupun untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, di antaranya melalui pelaksanaan pembangunan jalan desa sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tang Badui.

Dalam melaksanakan pembangunan yang ada di desa, Pemerintah Desa

Tang Badui tidak serta merta bekerja sendiri, tetapi bersama-sama melalui Badan Permasyarakatan Desa membuka forum untuk musyawarah bersama masyarakat, tokoh adat serta pihak terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur jalan. Proses pembangunan infrastruktur berangkat dari adanya perencanaan yang di sepakati di dalam forum musyawarah desa bersama dengan masyarakat, musyawarah terbuka memungkinkan identifikasi permasalahan yang lebih akurat berdasarkan kebutuhan langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak, perencanaan yang dibuat akan lebih diterima dan mendapat dukungan dalam tahap implementasi, hal ini dapat mengurangi potensi konflik kepentingan dan mempercepat pelaksanaan pembangunan. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Albert Darius selaku Ketua BPD:

”Dalam proses pembangunan yang kita lakukan, memang kami membuka ruang dialog dengan masyarakat, tokoh adat dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Tang Badui melalui musyawarah desa. Tujuannya ya agar proses pembangunan nanti bisa berjalan dengan baik berdasarkan kebutuhan masyarakat terkhusus tentang pembangunan infrastruktur jalan desa ini, dan partisipasi masyarakat yang ada di sini juga sudah lumayan baik, masyarakat aktif memberikan masukan, sehingga dalam proses pengambilan keputusan juga sudah melalui pertimbangan bersama dengan masyarakat”  
(dokumentasi wawancara pada tanggal 08 Januari 2025)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Albert Darius di atas sebagai Ketua BPD yang banyak terlibat langsung dalam proses pembangunan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Tang Badui memiliki bentuk partisipasi aktif. Partisipasi aktif dapat diartikan ketika individu atau kelompok terlibat langsung dan berkontribusi dalam suatu kegiatan atau proses, dalam partisipasi aktif masyarakat tidak hanya hadir atau mengikuti, tetapi juga mengambil

tindakan nyata untuk mengubah situasi. Hal ini juga disampaikan oleh John Samuel selaku wakil adat:

“Dalam proses pembangunan infrastruktur jalan desa ini, kami selaku masyarakat sangat dilibatkan ketika musyawarah desa oleh pemerintah desa, kami diberikan kesempatan untuk memberikan kritikan maupun saran dalam proses pembangunan. Dengan adanya forum ini, kami selaku masyarakat bebas memberikan pendapat sehingga masyarakat memberikan partisipasinya dengan aktif tanpa tekanan dari pihak manapun”  
(dokumentasi wawancara pada tanggal 30 Desember 2024)

Dalam sudut pandang masyarakat, dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang terjadi di musyawarah desa menambah rasa untuk membangun Desa Tang Badui bersama. Adanya pembangunan jalan desa ini juga menimbulkan respon masyarakat yang pada akhirnya memberikan ruang untuk masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan hingga pembangunan jalan Desa Tang Badui tersebut. Hal ini disampaikan oleh Oka Alang sebagai masyarakat Desa Tang Badui:

“Pembangunan jalan desa ini merupakan salah satu topik utama yang sering dibahas dalam musyawarah desa, menurut saya sebagai masyarakat pembangunan jalan desa ini penting mas, apalagi jalan ini akan menghubungkan ke kantor desa. Jalan ke kantor desa udah rusak mas dan susah dilalui apalagi kalau musim hujan mas. Dalam musyawarah desa, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat baik dari segi jenis pembangunan yang diperlukan, anggaran yang dibutuhkan dan teknis pengerjaannya mas. Saya sebagai masyarakat sangat antusias dengan pembangunan ini mas, jadi sebisa mungkin saya juga ikut terlibat aktif dalam setiap prosesnya”  
(dokumentasi wawancara pada tanggal 30 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Herman Liu selaku Kepala Desa Tang Badui menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa:

“Partisipasi masyarakat sangat penting karena pembangunan jalan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga kepentingan bersama. Dengan keterlibatan masyarakat, keputusan yang diambil akan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, serta proses pembangunan bisa berjalan lebih efektif dan transparan. Salah satu strategi yang kami terapkan adalah menggunakan presensi dalam setiap musyawarah desa. Dengan adanya daftar hadir, masyarakat akan merasa lebih dihargai dan terdorong untuk ikut serta secara aktif ketika pengambilan keputusan. Selain itu, kehadiran mereka juga menjadi bukti keterlibatan dalam pengambilan keputusan, sehingga hasil musyawarah lebih mewakili kepentingan seluruh masyarakat desa.  
(dokumentasi wawancara pada tanggal 13 Januari 2025)

Ramli Ade sebagai Kepala Urusan Perencanaan menjelaskan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan unsur masyarakat harus terlibat, sehingga tujuan dari adanya pembangunan ini dapat tercapai, hal ini disampaikan kepada peneliti sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat sangat penting karena mereka yang paling memahami kondisi dan kebutuhan di lapangan. Dalam musyawarah desa, tentu saja kami melibatkan masyarakat untuk memberi masukan, memiliki skala prioritas pembangunan dan menyepakati rencana pembangunan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, pembangunan jalan desa dapat berjalan sesuai dengan kepentingan bersama. Selain itu, partisipasi ini juga meningkatkan rasa memiliki, sehingga masyarakat lebih peduli dalam menjaga dan merawat hasil pembangunan yang disepakati bersama”  
(dokumentasi wawancara pada tanggal 13 Januari 2025)

**DAFTAR HADIR**  
**MUSYAWARAH DESA TANG BADUI**  
**23 - 10 - 2023**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KOLEN DAWAT, S.PD	KASI PMD KECAMATAN	
2.	MARSON	SPK PM K. K. T.	
3.	TIRO	11	
4.	HERMAN	KADES	
5.	DARLES	KASI	
6.	ASLIPIN	KETUA RT	
7.	JUWEN	KASI PEMERINTAHAN	
8.	YENI ROSITA	SEKDES	
9.	JUSLI	Anggota Masyarakat	
10.	ASRIKA	Kader Balita	
11.	Mofiani	Kader Lansia	
12.	MORNI	Kader Lansia	
13.	Yuliana	Anggota	
14.	Loli	Anggota Masyarakat	
15.	MORNI	"	
16.	Betty	Kader Desa	
17.	Salda	Kader Balita	
18.	SUFIUTA	Anggota Masyarakat	
19.	CILFAUTA J	Masyarakat	
20.	Jako Pemuda	Anggota BPD	
21.	ADAM	BPD	
22.	OTNER. Cim	Adm.	
23.	BRADANLY	Ceb. BPD	
24.	ACBERT	KIV BPD	
25.	DESTI	MASYARAKAT	
26.	FINI HARYANTI	KPM	
27.	AFILINDA	PKK	
28.	JULITA	BPD	
29.	PONSORO	KALUP	
30.	ORTHA	KADER POSYANDU	
31.	NORMA	KADER POSYANDU	
32.	MAKRIFANI	KADER POSYANDU	
33.	RICIN DAYANI	MASYARAKAT	
34.	AZIN SALINDI	MASYARAKAT	
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			



Sumber: Dokumen Musyawarah Desa Tang Badui

Dalam sudut pandang masyarakat, dengan dilibatkannya masyarakat

dalam proses perencanaan pembangunan yang terjadi di musyawarah desa menambah rasa untuk membangun Desa Tang Badui bersama. Wawancara yang dilakukan dengan Hernos Langub sebagai masyarakat Desa Tang Badui mendeskripsikan proses musyawarah desa:

“Dalam musyawarah desa, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan usulan terkait pembangunan jalan. Awalnya, pemerintah desa memaparkan rencana dan anggaran yang tersedia. Setelah itu, kami sebagai masyarakat diberikan ruang berdiskusi mengenai teknis pembangunan baik dalam bentuk tenaga maupun dukungan lainnya. Keputusan diambil secara mufakat agar hasilnya adil dan bermanfaat bagi semua, dengan adanya musyawarah kami merasa dilibatkan dan memiliki tanggung jawab bersama dalam pembangunan desa.  
(dokumentasi wawancara pada tanggal 08 Januari 2025)

Hasil dari beberapa wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan perangkat desa dan masyarakat, mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Tang Badui memiliki tingkat keterlibatan dalam proses pembangunan yang aktif. Hal ini disebabkan karena masyarakat diberikan kebebasan dalam memberikan pendapat tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, sehingga pembangunan infrastruktur jalan desa dilaksanakan berdasarkan dengan keinginan masyarakat Desa Tang Badui.

Partisipasi masyarakat yang aktif dalam musyawarah desa di Desa Tang Badui, khususnya dalam hal pembangunan jalan desa mencerminkan kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan, masyarakat bersama pemerintah desa bersama mengambil keputusan dalam musyawarah desa yang akan memberikan dampak besar terhadap mobilitas masyarakat desa. Musyawarah desa menjadi wadah yang efektif untuk menampung berbagai pendapat dan masukan, serta memberikan ruang bagi semua pihak untuk

berkontribusi baik dalam bentuk tenaga, materi ataupun ide.

Faktor penting yang mendorong tingginya partisipasi ini antara lain adalah karena pemerintah desa melakukan pendekatan kepada masyarakat dan adanya rasa tanggung jawab bersama untuk memperbaiki infrastruktur yang vital untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, dilibatkannya masyarakat desa dalam proses pembangunan membuat masyarakat merasa dihargai dan termotivasi untuk berpartisipasi. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat yang tinggi dalam musyawarah desa terkait pembangunan jalan di Desa Tang Badui menunjukkan bahwa partisipasi yang aktif dan kolaboratif dapat mempercepat proses pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta memperkuat hubungan sosial di antara masyarakat Desa Tang Badui.

## **B. Komunikasi Antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan.**

Komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa dengan masyarakat Tang Badui dalam pembangunan jalan desa menunjukkan pola komunikasi yang cukup partisipatif. Forum musyawarah desa menjadi wadah utama dalam penyampaian informasi, pengambilan keputusan dan pembagian peran dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuka ruang diskusi yang memungkinkan masyarakat memberikan saran, kritik dan gagasan terkait perencanaan pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya transparansi dan keterbukaan dalam pemerintahan desa.

Namun, dalam praktiknya komunikasi ini masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan sumber daya manusia di pemerintahan desa yang sering kali kurang mampu mengartikan kebijakan pembangunan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini berisiko menimbulkan kesalahpahaman atau kurangnya kepercayaan dari warga terhadap pemerintah desa. Selain itu, terdapat masyarakat yang memiliki ketidaksukaan pribadi kepada salah satu pemerintah desa sehingga hal ini menimbulkan *miss-komunikasi* dalam kegiatan pembangunan. Hal ini disampaikan oleh Juwen selaku Kepala Seksi Pemerintahan:

“Ketika pelaksanaan kegiatan pembangunan ini memang terkadang ada kendala yang harus kami hadapi, terlebih ini menyangkut kerja sama dengan masyarakat desa, jadi kami lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman satu sama lain. Memang ada masyarakat yang memiliki masalah pribadi dengan salah satu dari kami, sehingga masyarakat tersebut melampiaskannya ketika di pengerjaan pembangunan tersebut”

(dokumentasi wawancara pada tanggal 13 Januari 2025)

Protes yang dilayangkan oleh beberapa masyarakat kepada pemerintah desa biasanya menyangkut tentang proses pembangunan yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat, padahal masyarakat tersebut ikut serta dalam musyawarah desa ketika perencanaan pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Alhasil pemerintah desa akan tetap melanjutkan proses pembangunan tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan di dalam musyawarah desa tersebut. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Darles selaku Kepala Seksi Kesejahteraan menghasilkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Dalam proses pembangunan ya memang terkadang ada kendala mas, mau itu kendala yang bersifat pribadi atau yang lain, kami sebagai perangkat desa ya berusaha menjelaskan perlahan dan tetap memberikan respon

sebaik mungkin. Namanya juga kerja sama mas, kita juga gak bisa memaksakan kehendak kami. Hal yang kami lakukan kalau ada kendala di lapangan ya kami komunikasikan bersama-sama mas, jadi gak timbul kecurigaan kalau kami memihak salah satu pihak”  
(dokumentasi wawancara pada tanggal 13 Januari 2025)

Wawancara yang dilakukan dengan Herlina sebagai masyarakat menghasilkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Iya memang ada salah satu masyarakat yang memiliki ketidaksukaan dengan perangkat desa, beberapa kali saya diajak untuk ikut protes ke pemerintah desa terkait pembangunan jalan ini, cuma saya merasa pembangunan ini akan bisa mempermudah akses dan meningkatkan perekonomian desa jadi saya tetap ikut dalam proses pembangunan ini seperti yang sudah disepakati dalam musyawarah desa”  
(dokumentasi wawancara pada tanggal 17 Januari 2025)

Hal lain disampaikan oleh Jhon Samuel sebagai perwakilan adat di Desa Tang Badui:

“Terkait masalah ketika pelaksanaan pembangunan memang ada, saya sedikit banyak mengetahui permasalahannya apa. Saya sebagai wakil adat menjadi penengah dengan mengajak salah satu masyarakat yang memiliki masalah personal kepada pemerintah desa ini untuk berpikir objektif. Penolakan karena ketidaksukaan personal kepada perangkat desa tidak seharusnya menghambat pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat lain. Saya hanya gak mau kalau pembangunan ini gagal dilaksanakan hanya karena masalah pribadi saja, jadi saya mencoba melakukan apa yang saya bisa seperti mendorong terbukanya dialog antar masyarakat sehingga solusi terbaik bisa dicapai bersama”  
(dokumentasi wawancara pada tanggal 30 Desember 2024)

Meskipun terdapat banyak tantangan ketika pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di desa Tang Badui, tetapi hal ini tidak menjadikan alasan kegagalan dalam pembangunan tersebut. Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti, pemerintah desa merespon adanya protes dari masyarakat dengan cara yang tidak tendensius, artinya pemerintah desa tidak berpihak kepada salah satu

pihak manapun. Untuk mengatasi hal semacam itu, Pemerintah Desa Tang Badui biasanya membuka ruang untuk mediasi dengan masyarakat yang bersangkutan sehingga komunikasi yang terjalin dapat meminimalisir timbulnya masalah lagi.

Hasil observasi dan penelitian yang dilakukan peneliti di desa Tang Badui mengungkap sebuah fenomena yang menarik, dalam proses pembangunan infrastruktur jalan ini pemerintah desa bersama-sama masyarakat melakukan kerja sama untuk mencapai keberhasilan pembangunan ini. Kerja sama yang terjadi dalam hal ini sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa merasa diuntungkan dengan bantuan yang diberikan oleh masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur jalan ini, masyarakat diuntungkan karena kerja yang dilakukan mereka diberikan upah oleh pemerintah desa. Meskipun dalam hal ini terlihat seperti bisnis, tetapi hal menarik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tang Badui adalah tetap memberikan upah kerja kepada masyarakat yang sudah tidak bisa bekerja atau dalam hal ini lansia.

Hal ini disampaikan oleh Mohani Habia selaku Masyarakat desa Tang badui:

“Dalam proses pembangunan infrastruktur jalan ini memang pemerintah desa sangat mengharapkan keterlibatan dari seluruh masyarakat yang ada di desa ini, cuma kan memang ada beberapa masyarakat yang sudah tidak bisa bekerja lagi, meskipun masyarakat ini tidak bisa ikut bekerja dalam pembangunan jalan ini tetapi pemerintah desa tetap memberikan upah kepada mereka. Hal ini sangat baik ya mengingat pemerintah desa tidak melihat pembangunan jalan ini hanya sebatas bisnis semata”  
(dokumentasi wawancara pada tanggal 11 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yeni Rosita selaku Sekretaris Desa mengungkapkan alasan di balik diterapkannya kebijakan tersebut.

“Alasan kami kenapa tetap memberikan upah kepada masyarakat yang sudah tidak bisa bekerja dalam hal ini lansia ya mas, tentu saja karna pada dasarnya secara keseluruhan masyarakat Desa Tang Badui adalah

keluarga, dan kami perangkat desa hanya sebagai pelayan masyarakat. Jadi, ya gak mungkin mas kami tega membiarkan gitu aja masyarakat yang sudah tidak bisa bekerja, padahal kalau bicara tentang kebutuhan pemasukan pasti semua juga butuh mas. Jadi kami tetap mengakomodir kebutuhan masyarakat semampu kami”  
(dokumentasi wawancara pada tanggal 13 Januari 2025)

Analisis di atas menunjukkan adanya komunikasi interaksional antara pemerintah desa dengan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya umpan balik dan pertukaran makna secara dinamis antara kedua belah pihak. Pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pendengar aktif yang merespons masukan, kritik dan aspirasi warga. Selain itu, masyarakat Desa Tang Badui juga berpartisipasi dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan ini dengan menyuarakan kepentingan dan harapan mereka, seperti dampak lingkungan, pemanfaatan tenaga kerja lokal dan transparansi penggunaan anggaran. Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tang Badui dalam hal ini sangat baik, pemerintah desa Tang Badui tidak serta merta melihat dari segi keuntungan saja, tetapi masih menanamkan nilai-nilai kekeluargaan antar pemerintah desa dengan masyarakat.

### **C. Kepercayaan (*trust*) Antara Masyarakat dan Pemerintah Desa.**

Kepercayaan (*trust*) antara masyarakat dan pemerintah desa menjadi elemen fundamental dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur, termasuk dalam konteks ini pembangunan jalan di Desa Tang Badui. Kepercayaan ini tidak hanya terbentuk dari komunikasi yang baik, tetapi juga dari konsistensi pemerintah desa dalam menjalankan komitmen, transparansi dalam pengelolaan

dana serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat Desa Tang Badui. Di desa Tang Badui, hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa menunjukkan dinamika yang menarik, di mana masyarakat cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap pemerintah desa, tetapi tetap mengawasi jalannya pembangunan agar sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah desa.

Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, Pemerintah Desa Tang Badui melakukan beberapa cara untuk menjelaskan kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman satu sama lain. Wawancara dengan Yeni Rosita selaku sekretaris desa menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk membangun kepercayaan masyarakat, kami terus melakukan sosialisasi terbuka, menjelaskan manfaat pembangunan serta memastikan transparansi dalam setiap tahapannya. Kami juga selalu mendengar aspirasi masyarakat dan siap berdialog untuk mencari solusi bersama. Bagi kami sebagai pemerintah desa, kepercayaan masyarakat sangat penting, dan kami ingin pembangunan ini benar-benar membawa manfaat bagi semua”

(dokumentasi wawancara pada tanggal 11 Januari 2025)

Dalam konteks pembangunan jalan ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sangat dipengaruhi oleh keterbukaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah Desa Tang Badui telah berupaya membangun transparansi dengan melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah desa, di mana setiap tahapan pembangunan termasuk sumber pendanaan, alokasi anggaran serta tenaga kerja yang digunakan disampaikan secara terbuka. Hal ini membuat masyarakat merasa bahwa mereka adalah bagian dari pembangunan dan bukan sekedar penerima manfaat yang pasif. Wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu Norma, menghasilkan hasil wawancara

sebagai berikut:

“Dari awal proses pembangunan ini, saya sebagai masyarakat memang merasakan bahwa pembangunan ini lebih ke gotong royong ya, apalagi masyarakat juga mendukung pembangunan ini sehingga kami juga siap apabila di setiap proses pembangunan akan melibatkan kami. Menurut saya dengan melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya, masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah desa, karena kami juga diberikan ruang untuk mengawasi pemerintah desa”

(dokumentasi wawancara pada tanggal 11 Januari 2025)

Kepercayaan masyarakat juga erat kaitannya dengan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana pembangunan. Dalam proyek pembangunan jalan di Desa Tang Badui, pemerintah desa menggunakan dana desa serta kontribusi tenaga kerja dari masyarakat setempat. Kepercayaan juga berkaitan dengan respons pemerintah desa terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Pemerintah Desa Tang Badui secara umum sudah menunjukkan keterbukaan terhadap aspirasi warga, hal ini disampaikan oleh Mohani Habia sebagai masyarakat Desa Tang Badui:

“Kalau bicara soal kepercayaan, saya rasa masyarakat desa Tang Badui cukup percaya ya dengan pemerintah desa. Apalagi karena dari awal perencanaan sampai sekarang kami sebagai masyarakat selalu diajak untuk ikut serta dalam musyawarah desa. Jadi secara garis besar ya kami tahu bagaimana prosesnya, berapa dana yang digunakan dan siapa saja yang terlibat. Ketika musyawarah desa kami juga diberi tahu tentang anggaran yang digunakan dan kami selalu diberi ruang untuk bertanya maupun menyampaikan pendapat. Saya rasa untuk memperkuat rasa percaya masyarakat kepada pemerintah desa tetap melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan dan juga tetap bersifat transparan, sehingga jika terjadi perubahan atau kendala kami sebagai masyarakat tidak berburuk sangka langsung terhadap pemerintah desa”

(dokumentasi wawancara pada tanggal 11 Januari 2025)

Hal yang serupa disampaikan oleh Ronsono Samuel selaku bendahara desa Tang Badui:

“Kalau saya melihat dari sisi pemerintah desa, kepercayaan masyarakat terhadap kami dalam pembangunan jalan ini cukup baik ya. Karena dari awal perencanaan sampai eksekusi di lapangan kami selalu melibatkan masyarakat, kami juga terbuka terhadap anggaran yang kami pakai sehingga masyarakat tidak terlalu curiga kepada kami. Meskipun dalam beberapa aspek kami memiliki tantangan tersendiri seperti keterlambatan dalam pencairan dana dari pemerintah pusat atau kabupaten, sehingga terkadang masyarakat berpikir bahwa ada masalah dalam pengelolaan keuangan dari pihak pemerintah desa. Selain itu juga masih banyak masyarakat yang kurang paham sama teknis administrasi keuangan mas, jadi ketika ada perubahan alokasi anggaran karena kondisi di lapangan kami harus menjelaskan berulang kali ke masyarakat mas. Tapi sejauh ini, kami tetap menjaga komunikasi tetap terbuka dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa ada yang ditutup-tutupi dari kami”  
(dokumentasi wawancara pada tanggal 8 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemerintah desa dan juga dengan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa Tang Badui relatif tinggi. Faktor utama yang membangun kepercayaan ini adalah transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana dan keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah desa. Hal yang sama juga disampaikan oleh Joko Pendawa sebagai Anggota BPD:

“Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa Tang Badui sangat penting ya, terutama dalam proyek pembangunan jalan ini. Sebagai anggota BPD, saya melihat bahwa hubungan ini semakin baik seiring dengan meningkatnya transparansi dan keterbukaan dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kalau saya lihat dari sudut pandang anggota BPD, tugas kami kan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah desa harus mewakili aspirasi masyarakat, kalau dalam konteks pembangunan jalan ini, BPD bertugas menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa mas, kami juga harus memastikan bahwa dana yang digunakan transparan dan tepat sasaran. Ya dalam kerja sama ini prinsip kami kekeluargaan mas, jadi kami sangat menjaga kepercayaan masyarakat”  
(dokumentasi wawancara pada tanggal 08 Januari 2025)

Pemerintah desa telah berupaya membangun kredibilitas dengan

melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dari hal perencanaan sampai teknis pembangunan. Mohani Habia menekankan bahwa masyarakat merasa dihargai karena mereka diberi ruang untuk berpartisipasi, hal ini menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya tentang membuka akses informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipahami oleh seluruh masyarakat.

Pemerintah desa melalui musyawarah desa dan dukungan dari BPD telah berhasil menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa dihargai dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam hal pembangunan jalan desa di Desa Tang Badui menunjukkan hubungan yang kuat dan positif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan terkait pengelolaan anggaran dan seringnya terjadi keterlambatan pencairan dana, tetapi pemerintah desa masih bisa mengatasi hal ini melalui pendekatan yang lebih transparan.

#### **D. Berbagi Gagasan Antara Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan.**

Komunikasi interaksional dalam pembangunan jalan desa juga mencerminkan adanya proses berbagi gagasan antara masyarakat dan pemerintah desa. Masyarakat tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga berperan dalam memberikan masukan mengenai teknis pembangunan, pemanfaatan tenaga kerja lokal serta dampak lingkungan dari pembangunan yang dilakukan. Ketika membahas perencanaan pembangunan yang diadakan dalam

musyawarah desa, pemerintah desa meminta pertimbangan kepada masyarakat. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Herman Liu selaku Kepala Desa menyampaikan:

“Pembangunan jalan ini pada dasarnya bukan hanya keinginan pemerintah desa saja, tetapi juga memang keinginan dari masyarakat, sehingga ketika memulai sebuah pembangunan dari proses perencanaan sampai eksekusi program ya kami selaku pemerintah desa akan senantiasa meminta bantuan kepada masyarakat juga. Pembangunan infrastruktur jalan ini, kami menggunakan tenaga kerja lokal atau masyarakat setempat dengan memberikan upah kerja yang akan dibayarkan ketika masa kerja sudah selesai atau biasanya 90 hari kerja, dan hal tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama masyarakat”  
(dokumentasi wawancara pada tanggal 13 Januari 2025)

Dari penuturan yang disampaikan oleh Bapak Herman, dapat disimpulkan bahwa berbagi gagasan dalam forum musyawarah desa sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan jalan desa ini. Hal ini disampaikan juga oleh Ibu Herlina sebagai Masyarakat Desa Tang Badui:

“Dalam forum musyawarah desa kami sebagai masyarakat dimintai pendapat oleh pemerintah desa dengan perencanaan pembangunan ini, kami sebagai masyarakat sangat menghargai keputusan pemerintah desa dengan melibatkan kami sehingga kami dapat berbagi gagasan dengan leluasa. Saya pribadi sangat senang adanya pembangunan ini, terlebih pembangunan jalan ini menghubungkan dari wilayah penduduk ke kantor desa, harapannya ketika jalan ini sudah jadi, kami masyarakat bisa mendapatkan akses layanan ke kantor desa dengan lebih baik lagi.  
(dokumentasi wawancara pada tanggal 17 Januari 2025)

Dalam konteks perencanaan pembangunan yang terjadi di Desa Tang Badui, pemerintah desa dengan masyarakat memiliki hubungan yang harmonis, ini ditunjukkan dengan terjalinnya komunikasi dan berbagi gagasan yang aktif dalam musyawarah desa. Ketika musyawarah desa, masyarakat memberikan

gagasan untuk teknis pengerjaan pembangunan jalan ini, hal itu melingkupi hari kerja, panjang jalan yang akan dibangun, upah kerja dan teknis pengumpulan material pembangunan. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ramli Ade selaku Kepala Urusan Perencanaan menghasilkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Dalam konteks berbagi gagasan dalam perencanaan pembangunan jalan ini, saya selaku kepala urusan perencanaan perlu mengumpulkan data dan informasi dan ini tentu gak bisa kalo saya lakukan sendiri mas, terkadang kami juga minta bantuan dari masyarakat yang selanjutnya akan dibahas dalam musyawarah desa untuk melakukan perencanaan. Dinamika dalam forum musyawarah lebih menekankan bagaimana proses pembangunan akan berjalan, jadi bentuknya lebih seperti diskusi bersama masyarakat”  
(dokumentasi wawancara pada tanggal 13 Januari 2025)

Perencanaan pembangunan jalan yang disepakati dalam forum musyawarah desa memiliki panjang 420 meter dengan lebar 2 meter. Teknis pembangunan disepakati bahwa pengerjaan dilakukan bersama-sama agar pembangunan bersifat adil tanpa ada yang diberatkan satu sama lain. Selain itu, upah harian sebesar Rp. 150.000,00 mengikuti standar kabupaten yang akan dibayarkan ketika masa kerja selesai atau biasanya 90 hari kerja yang meliputi hari kerja senin-rabu.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Hernos Langub sebagai Masyarakat Desa Tang Badui menyatakan bahwa:

“Untuk teknis pembangunan ini kami menyepakati bersama dengan pemerintah desa dan masyarakat, bahwasanya pengerjaan pembangunan ini dengan sistem gotong royong mas, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa terbebani satu sama lain. Dalam 1 minggu juga kerja bangun jalan hanya senin sampai rabu aja, sisanya masyarakat bisa ke sawah lagi mas. Untuk upah sendiri kami gak keberatan kalau segitu mas, karna kalau mau menuntut berapa ribunya takut pemerintah desa malah keberatan mas dan juga memang standar kabupaten yang saya

tahu juga segitu mas, toh pembangunan jalan ini juga kebutuhan masyarakat mas”

(dokumentasi wawancara para tanggal 08 Januari 2025)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tang Badui sudah menerapkan prinsip keterbukaan antara pemerintah desa dengan masyarakat, sehingga dalam forum musyawarah desa didapatkan bahwa berbagi gagasan sangat penting demi keberhasilan pembangunan ini. Berbagi gagasan dalam perencanaan pembangunan tidak hanya semata-mata sebuah proses formalitas, tetapi benar-benar dilakukan sampai dalam proses pembangunan.

Berbagi gagasan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan merupakan faktor kunci dalam menciptakan pembangunan yang efektif, transparan dan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap proyek yang di bangun, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Keterbukaan dalam proses musyawarah serta transparansi dalam penggunaan anggaran membantu membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga mendorong kolaborasi yang lebih baik. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berdampak pada peningkatan infrastruktur, tetapi juga pada kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Partisipasi Masyarakat dalam Forum Desa**

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan berdasarkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sekedar hadir dalam musyawarah desa, tetapi juga aktif memberikan masukan dan saran terkait teknis pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang baik akan pentingnya pembangunan jalan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan dan aksesibilitas wilayah mereka. Forum musyawarah desa menjadi wadah utama dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih diterima oleh semua pihak dan meminimalisir potensi konflik kepentingan.

##### **2. Komunikasi Antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan.**

Dari aspek komunikasi, pemerintah desa telah menerapkan komunikasi yang cukup transparan dan responsif. Melalui badan permusyawaratan desa atau BPD, Pemerintah Desa Tang Badui membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk membahas rencana pembangunan dalam sistem yang gotong royong. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam komunikasi, dan juga adanya

faktor personal yang juga mempengaruhi jalannya komunikasi.

3. Kepercayaan (*trust*) Antara Masyarakat dan Pemerintah Desa.

Tingkat kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tang Badui tergolong tinggi. Transparansi dalam pengelolaan dana, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta tanggapan positif pemerintah desa terhadap kritik dan masukan masyarakat menjadi faktor utama yang membangun kepercayaan tersebut. Kepercayaan ini menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas dan kelancaran pelaksanaan pembangunan di Desa Tang Badui.

4. Berbagi Gagasan Antara Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan.

Berbagi gagasan antara masyarakat dan pemerintah desa menjadi elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengerjaan pembangunan. Kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah desa menunjukkan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dengan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan penerapan kebijakan yang inklusif dengan tetap memberikan upah kepada masyarakat yang sudah tidak bisa bekerja, seperti lansia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. (2012). *Bimbingan Dan Penyuluhan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar Saifuddin. (2015). *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Cohen, JM, And N.T Uphoff. (1977). *Rural Development Participation*. Cornell University. New York
- Dwiningrum, Siti Irine Dwi Astuti. (2011). *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Eko, S. (2013). *Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal, Dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: Ire.
- Eko, S., Khasanah, Ti, Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., Qomariyah, P., & Aksa, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. FPPD. Yogyakarta
- Imam, Sujarwanto. (2012). *Interaksi Sosial Antar Umat Beragama (Studi Kasus Pada Masyarakat Karangmalang Kedungbanteng Kabupaten Tegal)*. Journal Of Educational Social Studies Vol 1 No 2
- Isbandi Rekminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komoditas; Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. FISIP UI Press. Depok
- Jogiyanto Hartono, M. (Ed.). (2018). *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi.
- Kuncoro, Mudrajab. (2020). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhtar Alfian, Fatmawati, Samsir Rahim. (2022). *Kerja Sama Pemerintah Desa Dan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Paria Kabupaten Pinrang*. Vol 4, No. 1.
- Racmawati, I.N. (2019). *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Jurnal Ilmiah. Rahardjo, M. (2011). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN.

- Theresia, Aprilia. Krishna Andini, Prima Nugraha, Totok Mardikanto. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta. Bandung.
- Totok, M., & Poerwoko, S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Yunanto. (2021). *Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan*. Governabilitas, 2(1).
- Yusanto, Y. (2019). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal Of Scientific Communication*.

#### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

## **LAMPIRAN**

### **INTERVIEW GUIDE (PANDUAN WAWANCARA)**

Nama Informan :

Jabatan/Pekerjaan :

Usia :

Tingkat Pendidikan :

Jenis Kelamin :

Tanggal Wawancara:

1. Kepala Desa
  - a. Bagaimana proses perencanaan pembangunan dilakukan?
  - b. Apakah dalam proses perencanaan melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah?
  - c. Dalam menjalankan pembangunan infrastruktur, siapa saja pelaksana proyeknya?
  - d. Apakah memakai kerja sama dari pihak lain atau menggunakan tenaga kerja lokal?
  - e. Apa saja dampak dari adanya pembangunan infrastruktur jalan desa tersebut?
  - f. Bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan infrastruktur jalan?
  - g. Bagaimana komunikasi yang dibangun dari pemerintah desa kepada masyarakat desa dalam proses pembangunan infrastruktur jalan?
  - h. Apakah dalam proses pembangunan, masyarakat berkontribusi dalam memberikan gagasan?
  - i. Apa saja faktor penghambat yang dirasakan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa saat ini?
2. Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kaur, Kasi, BPD, dll)
  - a. Bagaimana proses perencanaan pembangunan dilakukan?
  - b. Apakah dalam proses perencanaan melibatkan masyarakat desa

dalam musyawarah?

- c. Bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan infrastruktur jalan?
- d. Bagaimana komunikasi yang dibangun dari pemerintah desa kepada masyarakat desa dalam proses pembangunan infrastruktur jalan?
- e. Apa saja faktor penghambat yang dirasakan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa saat ini?
- f. Apa saja dampak dari adanya pembangunan infrastruktur jalan desa tersebut?

### 3. Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa

- a. Apakah pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan keinginan masyarakat?
- b. Bagaimana proses musyawarah desa yang dilakukan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan infrastruktur?
- c. Bagaimana dampak dari adanya pembangunan infrastruktur jalan yang dirasakan oleh masyarakat?
- d. Apakah masyarakat antusias dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan di desa tang badui?
- e. Apakah dalam proses pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah desa membuka komunikasi dengan masyarakat?
- f. Apakah masyarakat dapat mempercayai pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur jalan di desa tang badui?
- g. Bagaimana proses berbagi gagasan dalam perencanaan pembangunan yang terjadi di dalam masyarakat?



Dokumentasi Bersama Ibu  
Herlina sebagai Masyarakat Desa  
Tang Badui



Dokumentasi Bersama Bapak  
Herman sebagai Kepala Desa  
Tang Badui



Dokumentasi Bersama Bapak  
Albert sebagai Ketua BPD Tang  
Badui



Dokumentasi Bersama Bapak  
Hernos Langub sebagai  
Masyarakat Desa Tang Badui



Dokumentasi Bersama Bapak  
Mohani Habia sebagai  
Masyarakat Desa Tang Badui



Dokumentasi Bersama Bapak  
Joko Pendawa sebagai Anggota  
BPD Tang Badui



Dokumentasi dalam Forum  
Musyawarah Desa



Dokumentasi dalam Forum  
Musyawarah Desa



Dokumentasi dalam Forum  
Musyawarah Desa